BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Setiap negara tentunya tidak dapat terlepas dari Hubungan Internasional. Hal ini karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga Hubungan Internasional melengkapi itu.

Hubungan Internasional tidak hanya terjadi karena ingin bekerjasama. Persahabatan, persengketaan, permusuhan, ataupun peperangan juga termasuk Hubungan Internasional. Di zaman yang sudah semakin berkembang ini menimbulkan adanya suatu hubungan yang membuka secara lebar terhadap kemungkinan adanya perselisihan dan persengketaan diantara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam Hubungan Internasional antar negara sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh beberapa persoalan yang ditimbulkan dari adanya Hubungan Internasional tersebut. Persengketaan ini diartikan sebagai perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lain.

Dari berbagai sumber potensi sengketa tersebut, yang sering terjadi adalah sengketa mengenai perbatasan. Ketidakjelasan batas-batas wilayah suatu negara

merupakan pemicu terjadinya konflik bersenjata antar negara. Seperti sengketa Thailand dan Kamboja.

Konflik perbatasan seringkali mewarnai dinamika hubungan antar negara. Inilah pula yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Thailand dan Kamboja adalah negara yang berbatasan langsung di Asia Tenggara, kedua negara ini awalnya merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang baik. Hal ini mungkin dikarenakan kedua negara tersebut memiliki banyak persamaan. Salah satu persamaan tersebut adalah persamaan agama, yaitu agama Buddha yang merupakan agama mayoritas di kedua negara tersebut.

Persamaan kedua adalah dari sistem pemerintahan mereka, yang sama-sama mengadopsi sistem monarki absolut. Namun hubungan yang baik itu lantas menjadi merenggang selepas konflik Perang Indochina pada 1975, selepas Perang Indochina tersebut hubungan kedua negara terus-menerus merenggang. Memburuknya hubungan Thailand dan Kamboja diperparah dengan konflik antara keduanya yang semakin memanas belakangan ini.

Wilayah kuil Preah Vihear merupakan sebuah wilayah yang terletak diperbatasan antara Kamboja dan Thailand, yakni Gunung Dangrek. Thailand dan Kamboja mengklaim wilayah Kuil Preah Vihear tersebut sebagai bagian dari teritori mereka, wilayah perbatasan ini sejak lama menjadi rebutan antara Kamboja dan Thailand. Kedua negara bersengketa tentang status kepemilikan kuil Preah Vihear.

Permasalahannya terletak pada satu tempat yaitu Kuil Preah Vihear. Sebuah kuil berusia kurang-lebih 900 tahun tersebut kini sedang ramai-ramainya

diperbincangkan. Penyebabnya adalah karena Candi Hindu Preah Vihear seluas 4,6 km2 yang dibangun pada abad ke-11 sebagai pengabdian kepada Dewa Syiwa terletak di bukit setinggi 525 m di atas permukaan laut di Pegunungan Dangrek, Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan dekat distrik Kantharalak, Thailand. Kuil tersebut kini sedang diperebutkan dua negara ASEAN, Thailand dan Kamboja. Meskipun terletak di wilayah Kamboja, dinding pegunungan Dangrek yang terjal membuat candi di puncak gunung ini hanya dapat ditempuh dari sisi perbatasan dengan Thailand(Diakses melalui http://international.sindonews.com/berebut-candi-preah-vihear-thailand-kamboja-bertarung-di-mahkamah-internasional pada tanggal 10/03/2016 pada pukul 14.30 WIB).

Akar masalah sengketa kuil ini lahir karena ketidakjelasan kesepakatan antara pemerintah Perancis (yang menduduki Kamboja) dan Pemerintah Siam (kini Thailand) pada awal tahun 1900. Perancis dan Thailand sepakat menetapkan garis batas kedua negara yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian *Franco-Siamese* pada tanggal 13 Februari 1904.

Namun,perjanjian ini tidak dengan tegas menetapkan di mana letak Kuil Preah Vihear berada. Akan tetapi, sebenarnya ada satu masalah lagi yang mendorong Kamboja maupun Thailand untuk memiliki wilayah sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Alasan tersebut adalah karena wilayah sekitar Kuil Preah Vihear adalah wilayah yang kaya akan sumber daya mineral,minyak bumi dan gas alam.

Kepemilikan akan wilayah sekitar Kuil Preah Vihear itu berarti akan menjamin terpenuhinya kebutuhan energi negara pemiliknya, juga sekaligus akan meningkatkan pemasukan negara tersebut dari sisi penjualan sumber energi. Hal

ini menambah alasan mengapa wilayah sekitar Kuil Preah Vihear merupakan wilayah yang layak untuk diperebutkan, baik oleh Thailand dan Kamboja.

Kedua negara itu sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya. Klaim Thailand berdasarkan peta yang dibuat tahun 1904 oleh kesepakatan kolonial Perancis dengan Siam yang menempatkan Kuil Preah Vihear berada pada sisi Thailand. Dalam kasus ini, Kamboja mendasarkan argumennya pada peta (*Annex I Map*) yang dibuat oleh pejabat Perancis pada tahun 1907 yang beberapa diantaranya adalah anggota *Mixed Commission* yang dibentuk berdasarkan *Boundary Treaty* antara France dan Siam tanggal 13 Februari 1904. Pada peta ini, daerah Dangrek yaitu lokasi dimana Kuil Preah Vihear terletak berada dalam wilayah Kamboja. Thailand di lain pihak berargumen bahwa peta tersebut tidaklah mengikat karena tidak dibuat oleh anggota *Mixed Commission* yang sah. Lebih lanjut, garis perbatasan yang digunakan dalam peta tersebut adalah berdasarkan *Watershed Line* yang salah dan bila menggunakan *Watershed Line* yang benar maka Kuil Preah Vihear akan terletak di dalam wilayah Thailand.

Ketika merdeka tahun 1953, Kamboja mulai mengangkat permasalahan kepemilikan Kuil Preah Vihear dengan Thailand. Hubungan kedua negara sempat tegang setelah Thailand mengirim tentaranya ke kuil tersebut. Thailand bahkan sempat mengamankan sebagian arca dan obyek kuil ke negerinya. Setelah upaya diplomatik gagal, kedua negara telah sepakat menyerahkan permasalahan ini ke Mahkamah Internasional (MI), dalam keputusannya tertanggal 15 Juni 1962 (*The Ha-gue Judgment* of 15 June 1962).

Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Kamboja sebagai pemilik Kuil Preah Vihear dan akibatnya Thailand harus menarik pasukan militernya maupun para penjaga yang dikerahkan di sekitar kuil atau disekitar wilayah kedaulatan Kamboja.

Keputusan mahkamah Internasional tersebut adalah bersifat mengikat dan *final* artinya para pihak yang bersengketa di hadapan Mahkamah Internasional tidak dapat melakukan banding atas putusan yang telah dikeluarkan. Mahkamah Internasional mendasarkan keputusannya pada petayang dibuat sekelompok ahli yang dibentuk atas kesepakatan antara Pemerintah Perancis dan Pemerintah Siam, yaitu *the Commission of Delimitation.* Dalam keputusannya, Mahkamah Internasional tidak dengan tegas menetapkan garis batas kedua negara. Mahkamah Internasional hanya menetapkan siapa yang memiliki kedaulatan atas kuil tersebut.

Pada bulan Juli 2008 Kuil Preah Vihear yang diperkirakan yang telah berumur 900 tahun dimasukkan dalam daftar warisan budaya dunia (*Word Heritage List*) oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengatahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), hal ini disambut gembira oleh Pemerintah Kamboja, namun memicu masalah di Thailand, beberapa aksi penolakan antara lain terjadi pada tanggal 15 Juli 2008 yakni penangkapan tiga orang demonstran dari Thailand yang sengaja melompati pagar berduri yang dipasang oleh tentara Kamboja di perbatasan dan memicu baku tembak antar negara.

Pada Oktober 2008, keadaan semakin memanas dengan adanya isu-isu peletakan ranjau darat di sekitar kuil dan melukai beberapa prajurit militer kedua belah pihak, hal tersebut menimbulkan kontak senjata antara tentara militer Kamboja dengan tentara militer Thailand di perbatasan dekat kuil Preah Vihear yang menjadi jantung sengketa antara kedua negara. Baku tembak yang pecah antara tentara militer kedua negara terjadi pada tanggal 15 Oktober 2008 yang mengakibatkan tewasnya dua orang tentara Kamboja dan melukai lima orang tentara Thailand, dan kemudian baku tembak untuk kedua kalinya terjadi pada tanggal 3 April 2009, akibat kontak senjata tersebut telah menewaskan dua orang tentara militer Thailand dan mengakibatkan sepuluh orang tentara militer lainnya mengalami luka-luka (Diakses melalui https://m.tempo.co/kamboja-thailand-sepakat-damai pada tanggal 10/03/2016 pada pukul 09.10 WIB).

Pada tanggal 18 Juli 2011, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa perlu adanya penarikan mundur kedua pasukan dan menghentikan kontak senjata.

Jika melihat konflik dengan Kamboja, peran milliter dianggap memberikan pengaruh yang besar. Beberapa provokasi militer dilakukan yang memunculkan kemungkinan besar untuk terjadinya perang. Hal ini yang kemudian membuat masalah dari hubungan Thailand dan Kamboja menjadi semakin berlarut-larut.

Selama pemerintahan Abhisit, situasi domestik ataupun hubungan dengan internasional menjadi lebih buruk. Beberapa kali terjadi aksi demonstrasi untuk dilakukan pemilu ulang. Kepemimpinan Abhisit juga mengalami legitimasi politik

karena kemenangannya dalam pemilu dianggap adanya intervensi militer didalamnya. Bukan hanya itu, Kebijakan luar negeri dianggap sebagai alat politik untuk menghancurkan lawan politiknya, yakni Thaksin.

Dalam pemilu tahun 2005 di Thailand, Partai Demokrat sebagai partai oposisi yang dipimpin oleh Abhisit memboikot pemilu dan membuka jalan bagi militer untuk mengkudeta Thaksin hanya berselang 5 bulan kemudian. Militer dalam perpolitikan Thailand memiliki peran yang sangat kuat dalam memberikan pengaruh. Dari 1930-an, beberapa kali militer Thailand melakukan aksi kudeta yang berhasil menurunkan Perdana Menterinya.

Abhisit dianggap menjadikan kepentingan pribadi yang diangkat sebagai kepentingan nasional yang justru menghancurkan diplomasi Thailand. Salah satu keputusan dalam kepemimpinan Abhisit pada saat itu adalah menjadikan Kamboja sebagai musuh nasional, dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Abhisit ingin menghindarkan Thailand dari Kamboja yang ia anggap sebagai negara yang dekat dengan Thaksin. Pemerintahan Abhisit yang sangat anti dengan Thaksin berusaha menghindarkan Thailand dari keterkaitan Thaksin.

Pada tanggal 3 Juli 2011, Yingluck Shinawatra terpilih sebagai perdana menteri baru Thailand menggantikan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, Yingluck yang dicalonkan oleh Partai Pheu Thai, sekaligus menjadi Perdana Menteri wanita pertama Thailand. Dibayangi oleh kedekatannya dengan Thaksin Shinawatra (mantan Perdana Menteri Thailand), Kemenangan Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri Thailand 2011 memunculkan banyak pro dan kontra mengingat

latar belakang Yingluck bukanlah seorang politisi melainkan seorang pembisnis yang sukses. Dengan latar belakang ini pula, Yingluck meyakinkan kepada publik bahwa ia mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi berdasarkan ilmu manajemen dan organisasi yang ia miliki(diakses melalui https://m.tempo.co/read/news/2013/06/17/118488896/kamboja-thailand-sepakat-damai, diakses pada tanggal 10/03/2016 pada pukul 23.33. WIB).

Memburuknya hubungan Thailand dengan Kamboja pada tahun 2008 bagi Yingluck tidak lain adalah karena instabilitas politik dalam negeri Thailand. Yingluck menganggap bahwa inilah yang merupakan kesalahan awal dari Thailand yang tidak akan mengubah hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri harus mampu mengubah krisis tersebut menjadi peluang untuk dapat memainkan peran Thailand di mata ASEAN.

Pergantian Perdana Menteri oleh Yingluck Shinawatra membuat hubungan Thailand-Kamboja menjadi lebih baik. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dapat menyelesaikan konflik ini melalui kebijakan dengan mengedepankan diplomasi.

Semangat kompromi selalu Yingluck tekankan dalam kepemimpinannya di tengah permasalahan Thailand. Yingluck Shinawatra merasa perlu bertanggung jawab untuk mengembalikan rasa hormat terutama dari negara tetangga Kamboja. Untuk itu, Yingluck melakukan berbagai upaya dalam menunjukkan peran Thailand yang pro -aktif dan rekonsiliatif.

Hal pertama yang Yingluck lakukan sebagai perdana menteri untuk menyelesaikan sengketa ini adalah dengan berkunjung ke Kamboja pada tanggal 15 September 2011. Kunjungan ini diyakini akan memperbaiki hubungan diplomatik dan membangun kerja sama bilateral yang lebih baik. Dalam kunjungan tersebut, dibicarakan mengenai kepentingan yang mendesak berkaitan dengan tuntutan mahkamah internasional untuk menarik mundur pasukan militer, menghentikan kontak senjata, dan menerima tim pengamat dari Indonesia dalam permasalahan Kuil Preah Vihear.

Langkah lain yang dilakukan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam merekonsiliasi hubungan dengan Kamboja khususnya terkait sengketa Kuil Preah Vihear adalah dengan pembentukan tim khusus. Yingluck menginginkan untuk diselesaikan melalui sesuai dengan prosedur yang benar, yakni mengikuti saran dari mahkamah internasional. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra secara terbuka bersedia melibatkan ASEAN dalam menyelesaian sengketa kawasan kuil Preah Vihear. Thailand bersedia menerima kehadiran tim peninjau dari Indonesia untuk mengawasi wilayah perbatasan. Kemudian telah dibentuk zona bebas militer seluas 2,5 km untuk memelihara perdamaian. Di zona bebas militer ini, pasukan Thailand dan Kamboja dilarang memasukinya, kecuali pasukan Indonesia sebagai peninjau dari ASEAN (diakses melalui http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik .Thailand-Kamboja pada tanggal 12 Maret 2016 pada pukul 23.45 WIB).

Penelitian lainnya yang membahas mengenai sengketa Thailand dan Kamboja skripsi yang berjudul "Pengaruh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Dalam Merubah Kebijakan Luar Negeri Thailand Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja" oleh Afrinaldi dari Universitas Andalas pada September 2014, dalam penelitian ini Afrinaldi membahas mengenai kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Yingluck untuk menyelesaikan sengketa Thailand-Kamboja dan pengaruh Perdana Menteri Yingluck dalam upaya memperbaiki hubungan bilateral Thailand dan Kamboja.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti mengenai adakah pengaruh feminitasnya dalam mempengaruhi setiap kebijakan yang diberikan Perdana Menteri Yingluck dalam menyelesaikan sengketa Thailand dan Kamboja.

Pendekatan feminisme digunakan peneliti untuk mengetahui adakah unsur feminisme dalam setiap kebijakan yang diputuskan oleh Perdana Menteri Yingluck dalam menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja, mengingat bahwa Perdana Menteri Yingluck adalah Perdana Menteri perempuan pertama di Thailand.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul ***"Kebijakan Luar Negeri Thailand dalam Sengketa Kuil Phreah Vihear antara Thailand dan Kamboja Dibawah Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ditinjau dari Perspektif Feminisme"*** untuk mengetahui adakah pengaruh feminisme dalam setiap kebijakan yang diberikan Perdana Menteri Yingluck dalam menyelesaikan permasalahan antara Thailand dan Kamboja.

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

   Didalam mata kuliah ini peneliti mempelajari mengenai teori Feminisme yang membantu peneliti dalam mengkaji dan memberi pandangan mengenai feminisme, hak asasi manusia dan demkorasi.

2. Diplomasi dan Negoisasi

   Didalam mata kuliah ini peneliti mempelajari mengenai cara dan strategi yang dilakukan suatu negara dalam menyelesaikan sengketa internasional seperti sengketa antara Thailand dan Kamboja.

3. Studi Keamanan Internasional

   Didalam mata kuliah ini peneliti mempelajari mengenai cara dan strategi yang dilakukan suatu negara dalam menjaga keamanan nasionalnya dan mengkaji strategi Perdana Menteri Yingluck dalam menjaga keamanan dari sengketa yang terjadi antara Thailand dan Kamboja.

4. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

   Dimata kuliah ini peneliti mempelajari lebih mendalam tentang hubungan negara-negara di Asia tenggara seperti penelitian yang diambil yaitu tentang negara Thailand dan Kamboja.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor :

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : **"Adakah pengaruh dari Perdana Menteri Yingluck dalam membuat kebijakan – kebijakan luar negeri untuk menyelesaikan sengketa kuil vihear antara Thailand dan Kamboja jika ditinjau dari sudut pandang feminisme".**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor :

1. Langkah apa saja yang diambil Perdana Menteri Yingluck dalam kebijakan luar negerinya terhadap sengketa kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja?
2. Adakah feminisme yang diterapkan Perdana Menteri Yingluck dalam Kebijkan luar negeri Thailand terhadap sengketa Thailand dan Kamboja?

Penelitian ini dibatasi sejak memanasnya konflik tahun 2008 sampai terpilihnya Perdana Menteri Yingluck menjabat menjadi perdana menteri Thailand (2011) dalam menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja dan ditinjau dari perspektif feminisme.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh perdana menteri Yingluck untuk menyelesaikan sengeketa kuil Preah Vihear yang telah terjadi berlarut-larut antara Thailand dan Kamboja serta adakah kaitannya dengan sisi feminitas dari Perdana Menteri Yingluck.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja.
2. Mengetahui adakah pengaruh feminim dari Perdana Menteri Yingluck dalam kebijakan menyelesaikan sengketa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Penelitian ini juga memberikan secara ringkas tentang sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akedemik untuk bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.